

**NAMA : BAYU PUTRA SETIA EKA PREMANA**

**KELAS : TI.24.C.2**

**NIM : 312410072**

---

1. Menurut Anda, apakah sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia saat ini sudah efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan? Jelaskan pendapat Anda disertai alasan. (15poin)
  2. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa seringkali dianggap belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pendapat Anda, apa kendala terbesar dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat? Berikan contoh konkret. (15poin)
  3. Bagaimana pendapat Anda mengenai pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional Indonesia? Apakah globalisasi mengancam atau justru memperkaya identitas nasional? Jelaskan dengan argumentasi Anda. (15poin)
  4. Demokrasi di Indonesia secara teoritis menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan berbagai penyimpangan. Menurut Anda, apa faktor utama yang menyebabkan tidak sesuai antara teori dan praktik demokrasi di Indonesia? Jelaskan pendapat Anda. (15poin)
  5. Dalam masyarakat seringkali terlihat kecenderungan untuk menuntut hak, namun melupakan kewajiban. Apa pendapat Anda mengenai kondisi ini? Mengapa kesadaran terhadap kewajiban sebagai warga negara penting untuk ditegakkan? (20poin)
  6. Menurut Anda, apakah prinsip *rule of law* sudah diterapkan secara konsisten di Indonesia? Apakah hukum sudah benar-benar menjadi panglima dalam kehidupan bernegara? Berikan contoh dan pendapat Anda (20poin)
- 

**JAWABAN :**

1. Menurut saya, sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia sudah cukup efektif, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan. Sistem ini memberikan pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga menciptakan sistem pengawasan dan keseimbangan yang sehat. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas. Namun efektivitas sistem ini terkadang terhambat oleh tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif, terutama jika partai pendukung presiden tidak dominan di parlemen. Misalnya saja, perbedaan kepentingan dapat menunda disahkannya undang-undang penting.
2. Kendala terbesar dalam penerapan nilai-nilai Pancasila adalah rendahnya keteladanan pemimpin dan rendahnya pendidikan karakter di masyarakat. Banyak pejabat publik yang tidak mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan gotong royong. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang termotivasi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contoh konkritnya adalah kasus korupsi yang masih marak di berbagai lembaga negara, yang bertentangan dengan sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

3. **Globalisasi dapat menjadi ancaman sekaligus peluang bagi identitas nasional Indonesia. Jika tidak disikapi secara bijak, globalisasi dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal, terutama di kalangan generasi muda yang lebih banyak terpapar budaya asing. Namun globalisasi juga dapat memperkaya jati diri bangsa jika kita mampu menyaring dan memadukan unsur global dengan kearifan lokal. Misalnya saja industri kreatif Indonesia seperti batik dan musik tradisional yang semakin mendapat pengakuan internasional berkat media dan teknologi global.**
4. **Faktor utama yang membedakan antara teori dan praktik demokrasi di Indonesia adalah lemahnya budaya politik dan rendahnya integritas aktor politik. Demokrasi seharusnya mengedepankan partisipasi rakyat dan transparansi, namun dalam praktiknya masih banyak terjadi politik uang, dinasti politik, dan manipulasi suara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia sudah demokratis secara prosedur, namun pada hakikatnya masih jauh dari demokrasi yang ideal.**
5. **Menurut saya, kecenderungan masyarakat yang menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban mencerminkan ketidakseimbangan pemahaman terhadap peran warga negara. Kewajiban seperti membayar pajak, menjaga ketertiban, dan berpartisipasi dalam pembangunan seringkali terabaikan. Kesadaran akan kewajiban penting untuk membangun masyarakat yang adil dan tertib. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban, maka hak tidak dapat dipenuhi secara penuh karena Negara memerlukan kontribusi dari seluruh warga negara agar dapat berfungsi secara efektif.**
6. **Prinsip rule of law di Indonesia masih belum diterapkan secara konsisten. Secara formal, hukum sudah ada dan terstruktur, tetapi dalam praktiknya masih sering terjadi diskriminasi hukum dan penegakan hukum yang lemah. Hukum belum sepenuhnya menjadi panglima karena masih adanya intervensi politik dan korupsi dalam proses penegakan hukum. Contohnya, kasus korupsi oleh pejabat tinggi sering kali ditangani dengan lamban, sementara rakyat kecil lebih cepat diproses. Ini menunjukkan bahwa supremasi hukum masih bersifat elitis dan belum merata.**